

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diperlukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1619 perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan kebijakan anti korupsi. Variabel ini akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Berikut adalah tabel statistik deskriptif dan penjabarannya :

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Perusahaan yang Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Independensi Dewan Komisaris	1434	.17	1.00	.4333	.12364
Kompetensi Komite Audit	1434	.25	1.00	.8549	.20345
Kepemilikan Institusional	1434	.00	1.00	.6754	.21552
Ukuran Perusahaan	1434	7.95	20.84	15.1018	1.90317
Risiko Industri	1434	.00	1.00	.1318	.33839
Keberagaman Gender	1434	.00	1.00	.1226	.18047
Valid N (listwise)	1434				

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Pada tabel 4.1 menggambarkan statistik deskriptif untuk perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Dari total sampel yakni 1619 perusahaan, sebanyak 1434 perusahaan atau sebesar 88,57% perusahaan

dari total sampel tergolong dalam kelompok perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi .

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Perusahaan yang Tidak Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Independensi Dewan Komisaris	185	.25	.75	.4025	.10207
Kompetensi Komite Audit	185	.33	1.00	.8391	.21185
Kepemilikan Institusional	185	.00	.99	.6636	.24676
Ukuran Perusahaan	185	10.11	19.26	13.6719	1.54014
Risiko Industri	185	.00	1.00	.1568	.36456
Keberagaman Gender	185	.00	1.00	.1207	.21743
Valid N (listwise)	185				

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Pada tabel 4.2 menggambarkan statistik deskriptif untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Dari total sampel yakni 1619 perusahaan, sebanyak 185 perusahaan atau sebesar 11,43% perusahaan dari total sampel tergolong dalam kelompok perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Berikut adalah interpretasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian :

#### 4.1.1 Statistik Deskriptif Independensi Dewan Komisaris

Variabel Independensi diukur menggunakan proporsi antara jumlah dewan komisaris yang independen dengan keseluruhan total dewan komisaris dalam perusahaan. Untuk variabel independensi dewan komisaris, perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,17 yang diraih oleh perusahaan

Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 1,00 yang diraih oleh Bank MNC Internasional Tbk (BABP) pada tahun 2013 serta Bentoel International Investama Tbk (RMBA) tahun 2017. Sedangkan pada perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,25 dan nilai maksimum sebesar 0,75. Nilai minimum diperoleh oleh perusahaan Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) tahun 2013, Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) tahun 2014, serta Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk (RBMS) tahun 2017. Sementara itu nilai maksimum diperoleh perusahaan Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) tahun 2017.

Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata independensi dewan komisaris sebesar 0,4333. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata mempunyai jumlah komisaris independen sebesar 43,33% dari total keseluruhan dewan komisaris. Sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata independensi dewan komisaris sebesar 0,4025. Artinya bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata mempunyai jumlah komisaris independen sebesar 40,25% dari total keseluruhan dewan komisaris. Hasil nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan

anti korupsi memiliki jumlah komisaris independen yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan anti korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan memiliki proporsi dewan komisaris independen yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

#### 4.1.2 Statistik Deskriptif Kompetensi Komite Audit

Variabel kompetensi komite audit diukur menggunakan proporsi antara jumlah komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi dan atau keuangan dengan keseluruhan total komite audit dalam perusahaan. Pada variabel kompetensi komite audit, perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,25 yang diraih oleh perusahaan perusahaan Asahimas Flast Glass Tbk (AMFG) tahun 2013, Asahimas Flast Glass Tbk (AMFG) tahun 2014 serta Bukit Asam Tbk (PTBA) tahun 2017 . Sementara itu nilai maksimum sebesar 1,00 diraih oleh perusahaan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) tahun 2013, Agung Podomoro Land Tbk (APLN) tahun 2014, serta Bank Sinarmas Tbk (BSIM) tahun 2016.

Pada perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,33 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai minimum diperoleh oleh Mahaka Media Tbk (ABBA) tahun 2013, Fast Food Indonesia Tbk (FAST) tahun 2014 dan Chanpion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) tahun 2017. Sedangkan nilai

maksimum diperoleh perusahaan Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) tahun 2013, Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) tahun 2015 dan Tanah Laut Tbk (INDX) tahun 2017.

Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata kompetensi komite audit sebesar 0,8549. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata mempunyai jumlah komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi dan atau keuangan sebesar 85,49% dari total keseluruhan komite audit. Sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata kompetensi komite audit sebesar 0,8391. Artinya bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata mempunyai jumlah komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan sebesar 83,91% dari total keseluruhan komite audit. Hasil nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki jumlah komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi dan atau keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan anti korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan memiliki komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi dan atau keuangan yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

### 4.1.3 Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki pihak institusional dibagi dengan total saham perusahaan. Pada variabel kepemilikan institusional, perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang diraih oleh perusahaan Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) tahun 2013, Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) tahun 2014, serta PT. Panca Global Kapital Tbk (PEGE) tahun 2016. Di sisi lain nilai maksimum sebesar 1,00 diraih oleh perusahaan Bank Just Indonesia Tbk (BCIC) tahun 2013, Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) tahun 2014, serta PT. Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) tahun 2016.

Pada perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,99. Nilai minimum diperoleh oleh perusahaan Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) tahun 2017 dan nilai maksimum diperoleh perusahaan Ateliers Mecaniques D Indonesia Tbk (AMIN) tahun 2015.

Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,6754. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak institusional pada perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata memiliki saham perusahaan sebesar 67,54%. Sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan

anti korupsi memiliki rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,6636. Artinya bahwa pihak institusional pada perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata memiliki saham perusahaan sebesar 66,36%. Hasil nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki jumlah kepemilikan institusional yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan anti korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

#### **4.1.4 Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan**

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total asset yang dimiliki perusahaan. Pada variabel ukuran perusahaan, perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 7,95 yang diraih oleh perusahaan Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 20,84 yang diraih oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2017. Sedangkan pada perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 10,11 dan nilai maksimum sebesar 19,26. Nilai minimum diperoleh oleh perusahaan Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) tahun 2013 dan nilai

maksimum diperoleh oleh PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) tahun 2016.

Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata nilai logaritma natural aset sebesar 15,1018. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata adalah perusahaan yang besar atau menengah ke atas karena memiliki logaritma natural aset yang cukup tinggi. Sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata nilai logaritma natural aset sebesar 13,6719. Artinya bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata adalah perusahaan yang kecil karena memiliki logaritma natural aset yang rendah.

Hasil nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki total aset yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan memiliki logaritma natural aset yang tinggi atau semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung



terdorong mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

#### 4.1.5 Statistik Deskriptif Risiko Industri

**Tabel 4.3 Statistik Frekuensi Variabel Risiko Industri**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Low risk	1401	86.5	86.5	86.5
	High Risk	218	13.5	13.5	100.0
	Total	1619	100.0	100.0	

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Variabel risiko industri diukur dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang ada dalam kategori *high risk* akan diberi nilai satu (1). Sedangkan perusahaan yang berada dalam kategori *low risk* akan diberi nilai nol (0). Risiko industri menunjukkan tingkat kerentanan suatu sector industri terhadap tindakan korupsi.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perusahaan yang tergolong *high risk* dalam penelitian ini berjumlah 1401 perusahaan atau sebesar 86,53%. Sedangkan perusahaan *low risk* dalam penelitian ini berjumlah 218 perusahaan atau sebesar 13,46%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang tergolong dalam industri *low risk* yang menjadi sampel dalam penelitian lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tergolong dalam industry *high risk*.

Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai rata-rata

risiko industri sebesar 0,1318. Sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai rata-rata risiko industri sebesar 0,1568. Hal tersebut mengindikasikan perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki risiko industri yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Hasil nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi tergolong perusahaan dalam kategori *low risk* dan yang tidak mengungkapkan adalah perusahaan yang masuk dalam kategori *high risk*. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan berada suatu industry dengan kategori *low risk* maka perusahaan tersebut cenderung terdorong mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

#### **4.1.6 Statistik Deskriptif Keberagaman *Gender* dalam Anggota Komisaris**

Variabel keberagaman *gender* dalam anggota komisaris diukur menggunakan proporsi antara jumlah dewan komisaris perempuan dengan keseluruhan total dewan komisaris dalam perusahaan. Untuk variabel keberagaman *gender* dalam anggota komisaris, perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang diraih oleh perusahaan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) tahun 2013, Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM) tahun 2014

dan Garuda Metalindo Tbk (BOLT) tahun 2015. Nilai maksimum sebesar 1,00 diraih oleh perusahaan Batavia Prosperindo Finance Tbk (BPFI) tahun 2013, PT. Protech Mitra Perkasa Tbk (OASA) tahun 2016, dan Gading Development Tbk (GAMA) tahun 2017. Sedangkan pada perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai minimum diperoleh oleh perusahaan Arita Prima Indonesia Tbk (APII) tahun 2013, Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) tahun 2013 serta, Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) tahun 2017. Sementara itu nilai maksimum diperoleh perusahaan Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) tahun 2014, Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) tahun 2015 dan Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) tahun 2016.

Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata keberagaman *gender* dalam anggota komisaris sebesar 0,1226. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata mempunyai jumlah dewan komisaris perempuan sebesar 12,26% dari total keseluruhan dewan komisaris. Sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki rata-rata independensi dewan komisaris sebesar 0,1207. Artinya bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi rata-rata memiliki jumlah dewan komisaris perempuan sebesar

12,07% dari total keseluruhan dewan komisaris. Hasil nilai rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi memiliki jumlah dewan komisaris yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan anti korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris perempuan yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

## **4.2 Analisis Regresi Logistik**

Pada penelitian ini digunakan uji regresi logistik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Pengujian regresi logistik ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini berupa data dengan tipe kategori. Variabel dependen dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Kode 1 diberikan pada perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi, sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan tersebut diberi kode 0. Berikut adalah beberapa tahapan pengujian sebelum masuk ke pengujian hipotesis :

### **4.2.1 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik**

Pengujian kelayakan model regresi logistik ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi logistik

yang digunakan sudah layak atau belum. Uji kelayakan model regresi logistik dalam penelitian ini menggunakan *Chi-square Goodness-of-fit Test* dengan ketentuan model dikatakan layak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Adapun hasil *output* pengujian kelayakan model regresi adalah sebagai berikut

**Tabel 4.4 Tabel Uji Kelayakan Model Regresi Logistik**

		Omnibus Tests of Model Coefficients		
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	109.026	6	.000
	Block	109.026	6	.000
	Model	109.026	6	.000

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Pada tabel 4.4 yakni output dari *Omnibus Test*, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji *chi-square goodness of fit* sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik sudah tepat dan dapat digunakan untuk proses pengujian selanjutnya.

#### 4.2.2 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel dependennya. Untuk menilai koefisien determinasi, maka digunakan pengujian *Cox &*

*Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square*. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	1041.587 <sup>a</sup>	.065	.128

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,128 atau sebesar 12,8%. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dalam pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan adalah sebesar 12,8%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 87,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian.

#### **4.2.3 Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi Logistik**

Pengujian kelayakan keseluruhan model regresi logistik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat telah cukup mampu menjelaskan data atau tidak. Pengujian kelayakan ini dilakukan dengan menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow Test*. Penarikan kesimpulan untuk pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi lebih

dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang dibuat telah cukup mampu menjelaskan data dalam penelitian. Hasil pengujian kelayakan keseluruhan model regresi logistik dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Tabel Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi Logistik**

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.178	8	.192

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Data yang tertera dalam tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow Test* adalah sebesar 0,192 atau lebih dari 0,05. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi logistik yang dibuat telah mampu menjelaskan data dalam penelitian sehingga data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### 4.2.4 Uji Kemampuan Pengklasifikasian Data

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan model regresi logistik untuk mengklasifikasikan data penelitian. Hasil pengujian kemampuan model regresi logistik dalam pengklasifikasian data dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Tabel Uji Kemampuan Pengklasifikasian**

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed		Predicted			
		Pengungkapan Anti Korupsi		Percentage Correct	
		Tidak Mengungkapk an Anti Korupsi	Mengungkapk an Anti Korupsi		
Step 1	Pengungkapan Anti Korupsi	Tidak Mengungkapkan Anti Korupsi	0	185	.0
		Mengungkapkan Anti Korupsi	7	1427	99.5
Overall Percentage					88.1

a. The cut value is .500

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa kemampuan model regresi logistik untuk mengklasifikasikan data dengan benar adalah sebesar 88,1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang dibuat telah cukup baik dalam mengklasifikasikan data sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis

#### 4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penarikan kesimpulannya dapat dilihat dari nilai Beta untuk melihat arah hipotesis dan nilai signifikansinya. Hasil pengujian hipotesis dapat disajikan sebagai berikut :



**Tabel 4.8 Tabel Pengujian Hipotesis**

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	KI	1.599	.779	4.208	1	.040	4.948
	KA	.449	.384	1.364	1	.243	1.567
	INST	.250	.358	.490	1	.484	1.284
	LNASSET	.450	.049	84.893	1	.000	1.568
	INDSTR	-.450	.233	3.732	1	.053	.638
	GENDER	.508	.421	1.453	1	.228	1.662
	Constant	-5.618	.863	42.354	1	.000	.004

a. Variable(s) entered on step 1: KI, KA, INST, LNASSET, INDSTR, GENDER.

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

Berdasarkan *output* pengujian hipotesis di atas, model regresi logistik yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln} \frac{p}{p-1} = -5,618 + 1,599 \text{ KI} + 0,449 \text{ KA} + 0,250 \text{ INST} + 0,450 \text{ LNASSET} - 0,450 \text{ INDSTR} + 0,508 \text{ GENDER}$$

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel 4.8, maka dapat dijelaskan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel komisaris independen memiliki nilai sig/2 sebesar 0,02 dengan beta positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi karena nilai sig/2 < 0,05 dan beta positif sebesar 1,599. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa

independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi **diterima**.

**b. Hipotesis Kedua**

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel kompetensi komite audit memiliki nilai sig/2 sebesar 0,1215 dengan beta positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi karena nilai sig/2 > 0,05 dan beta positif sebesar 0,449. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi **ditolak**.

**c. Hipotesis Ketiga**

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai nilai sig/2 sebesar 0,242 dengan beta positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi karena nilai sig/2 > 0,05 dan beta positif sebesar 0,250. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi **ditolak**.

**d. Hipotesis Keempat**

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai sig/2 sebesar 0,000 dengan beta positif. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi karena nilai  $\text{sig}/2 < 0,05$  dan beta positif sebesar 0,450. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi **diterima**.

**e. Hipotesis Kelima**

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel risiko industri memiliki nilai  $\text{sig}/2$  sebesar 0,0265 dengan beta negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi karena nilai signifikansi  $< 0,05$  dan beta negatif sebesar -0,450. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa risiko industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi **ditolak**.

**f. Variabel Kontrol**

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel risiko industri memiliki nilai  $\text{sig}/2$  sebesar 0,114 (lebih dari alfa 0,05) dengan beta positif sebesar 0,508. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberagaman *gender* dalam anggota komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi di perusahaan karena nilai  $\text{sig}/2 < 0,05$  dan beta positif sebesar 1,599.

Pada dasarnya, komisaris independen merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan, kekeluargaan, kepengurusan, ataupun kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Sehingga dengan hadirnya komisaris independen dalam suatu perusahaan akan lebih meningkatkan pengawasan dan meminimalisir tindakan oportunistik dari manajemen. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi pengawasannya komisaris independen bebas dari benturan kepentingan atau intervensi dari pihak lain. Oleh karena Komisaris Independen sama sekali tidak memiliki konflik kepentingan dan hanya berfokus pada kelangsungan hidup perusahaan, serta memastikan perusahaan dikelola dengan baik, maka komisaris independen akan mendorong pihak manajemen melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan sehat dan melakukan pengungkapan informasi yang akan memberi *feedback* baik bagi perusahaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

adalah dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan sebagai upaya pencegahan dan juga bentuk komitmen perusahaan terhadap *shareholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Selain bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan perusahaan, komisaris independen juga dimungkinkan untuk memberi teladan dalam bentuk tindakan melawan korupsi agar lebih maksimal dalam memunculkan kesadaran pentingnya perilaku anti korupsi dalam suatu bisnis. Komisaris independen mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, utamanya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan.

Semakin banyak proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan memperketat pengawasan dan memperkuat mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara informasi yang ada di perusahaan dengan informasi yang akan disajikan kepada *stakeholder*, sehingga akan mendorong tingginya pengungkapan anti korupsi yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya jumlah komisaris independen dalam proporsi dewan komisaris, maka akan semakin mendorong kecenderungan perusahaan dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsinya. Penelitian ini didukung oleh penelitian Healy Serafeim (2015) yang dikutip dalam de Melo (2015) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian Fitriana dan Prastiwi (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan makin efektif aktivitas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian Healy Serafeim (2014) yang dikutip dalam Joseph et al., (2016).

#### **4.4.2 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan**

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa variabel kompetensi komite audit memperoleh nilai  $t_{sig/2}$  sebesar 0,1215 (lebih dari alfa 0,05) dan beta positif sebesar 0,449. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan, artinya banyak sedikitnya jumlah komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan atau keuangan, tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsinya. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini tidak terdukung secara statistik sehingga H2 ditolak.

Dalam hipotesis dijelaskan bahwa semakin tinggi jumlah komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan atau keuangan akan semakin mendorong kecenderungan perusahaan dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsinya. Dengan kemampuan

dibidang akuntansi dan atau keuangan pemantauan terhadap laporan keuangan menjadi lebih ketat sehingga akan mengarah kepada transparansi dan kualitas laporan keuangan yang baik sebagai cerminan tindakan anti korupsi di perusahaan.

Akan tetapi dalam penelitian ini, banyak sedikitnya prosentase komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi dan atau keuangan tidak mempengaruhi pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan bahwa ada kompetensi dibidang lain yang dirasa lebih efektif dan relevan untuk mendorong pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Misalnya saja latar belakang pendidikan di bidang hukum. Seseorang yang memiliki latar belakang di bidang hukum dianggap lebih sadar akan potensi pelanggaran-pelanggaran korupsi dan lebih memahami peraturan hukum mengenai korupsi. Sehingga dengan demikian komite audit yang berlatar belakang hukum dirasa lebih sensitif terhadap korupsi apabila dibandingkan dengan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Dugaan lain terhadap penolakan hipotesis ini adalah pengungkapan anti korupsi mengabaikan apapun latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komite audit tersebut. Mengingat bahwa istilah korupsi merupakan sesuatu hal yang umum, maka tidak diperlukan kompetensi khusus untuk mendorong kesadaran dalam melakukan pengungkapan anti korupsi di perusahaan tersebut. Selain itu, pada dasarnya tugas

komite audit secara umum di perusahaan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut (1) memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) memastikan struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) memastikan pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku, dan (4) memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa peran dari komite audit secara umum lebih mengarah kepada bagaimana penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku dan proses audit di perusahaan secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian kemungkinan seorang komite audit perlu memiliki sertifikasi khusus agar mampu mendorong pengungkapan anti korupsi di perusahaan.

Maka dapat dikatakan bahwa dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan atau keuangan tidak mempengaruhi upaya pengungkapan anti korupsi di perusahaan. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Bedard dan Gendron (2010) dalam (Musallam, 2018) berpendapat bahwa komite audit yang memiliki kompetensi di bidang keuangan akan lebih kritis dalam mengidentifikasi dan akan memacu pihak manajemen dan audit eksternal meningkatkan kualitas laporan keuangannya, yang tentu akan



berdampak pada peningkatan pelaporan kebijakan perusahaan mengenai anti korupsi dan mengurangi biaya agensi.

#### **4.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecenderungan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan**

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa variabel kompetensi komite audit memperoleh nilai  $t$  sebesar 0,242 (lebih dari alfa 0,05) dan beta positif sebesar 0,250. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan, artinya semakin besar saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusional, tidak mempengaruhi kecenderungan pengungkapan kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan. Dengan demikian, hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak terdukung secara statistik sehingga H3 ditolak.

Dalam hipotesis dijelaskan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional mencerminkan bahwa proses pemantauan oleh pihak institusional terhadap kinerja perusahaan akan semakin ketat. Selain itu pihak institusional akan mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas lagi dengan tujuan semakin menciptakan transparansi. Dengan adanya proses *monitoring* yang ketat dan dorongan untuk semakin transparan maka akan meningkatkan kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi sebagai komitmen perusahaan

untuk melawan dan mencegah tindakan korupsi di perusahaannya (Rouf dan Harun, 2011).

Akan tetapi dalam penelitian ini, banyak sedikitnya prosentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional tidak mempengaruhi pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena struktur kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi. Perwitasari (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan di Indonesia cenderung terkonsentrasi karena rata-rata sebesar 52,83% merupakan perusahaan yang memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi, sedangkan sisanya sebesar 47,17% merupakan perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan saham tersebar. Bukti lain diperoleh dari penelitian Claessens *et al* (2002) yang menyatakan bahwa Indonesia dan Thailand memiliki presentase yang rendah mengenai perusahaan dengan kepemilikan menyebar. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik kepemilikan saham di Indonesia dan Thailand sangat terkonsentrasi. Kepemilikan saham terkonsentrasi berarti bahwa saham tersebut hanya dimiliki oleh satu atau pihak tertentu saja sehingga pihak tersebut mempunyai akses yang besar untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan.

Dalam hal ini besarnya kepemilikan saham institusional tidak mempengaruhi pengungkapan kebijakan anti korupsi, karena pemilik saham terkonsentrasi sebagai investor bisa saja memiliki kecenderungan beritikad buruk, artinya bahwa niat investasinya hanya

untuk eksploitasi atau hanya berdasar pada kepentingan sendiri saja. Sehingga pemilik saham terkonsentrasi mempedulikan pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Selain itu, apabila dilihat dari perspektif investasi, kemungkinan investor institusional memiliki perspektif jangka pendek sehingga investor tersebut hanya peduli terhadap kenaikan harga saham jangka pendek, tanpa mempedulikan bagaimana pemantauan atau tata kelola yang ada di perusahaan.

Sehingga dengan dapat disimpulkan bahwa kemungkinan investor tersebut hanya berfokus pada kepentingan investasinya. Sedangkan mengenai pengungkapan informasi yang lebih luas, misalnya mengenai pengungkapan kebijakan anti korupsi sepenuhnya merupakan keputusan dan pilihan dari pihak manajemen. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusional tidak mempengaruhi pengungkapan kebijakan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rouf dan Harun (2011) serta El-Gazzar (1998) dalam Eng dan Mak (2003) yang menyatakan bahwa ada korelasi positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan.

#### 4.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi di perusahaan karena nilai  $\text{sig}/2 < 0,05$  dan beta positif sebesar 0,450.

Perusahaan yang besar tentu lebih disoroti dan lebih menjadi perhatian investor serta masyarakat luas. Total aset yang besar menggambarkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar dan dianggap lebih mampu menghasilkan profit yang baik untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Menjadi pusat perhatian atau sorotan utama dari publik tentu memunculkan tanggung jawab yang besar bagi perusahaan tersebut. Untuk tetap menjaga nama baik perusahaan dan mempertahankan kepercayaan dari publik, tentu perusahaan harus melakukan kegiatan bisnis yang berlandaskan etika kejujuran dan mengungkapkan segala informasi mengenai perusahaan yang menguntungkan baik bagi pembaca maupun bagi perusahaan itu sendiri.

Etika kejujuran dalam berbisnis erat kaitannya dengan tindakan anti korupsi. Perilaku anti korupsi dalam suatu kegiatan bisnis tentu akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan memberi nilai tambah tersendiri bagi pihak konsumen, *stakeholder*, *shareholder*, dan pemangku kepentingan lain. Karena apabila sampai sebuah perusahaan

besar tersandung kasus korupsi maka banyak kerugian yang harus ditanggung baik dari segi finansial maupun non finansial misalnya kehilangan investor, mudurnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut dan hilangnya kesempatan bagi perusahaan tersebut untuk melanjutkan bisnis tersebut. Maka dari itu sebagai upaya antisipasi terhadap tindakan korupsi dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan besar akan lebih terdorong mempublikasikan kebijakan anti korupsinya dalam laporan tahunan perusahaan. Sebab segala informasi yang diungkapkan oleh perusahaan pastinya akan dibaca oleh pemangku kepentingan, mempengaruhi pandangan mereka terhadap perusahaan, dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Healy dan Serafeim (2011) yang menyatakan bahwa apabila ada skala ekonomi untuk menilai tingkat perusahaan yang mengembangkan sistem anti korupsi dan memberikan pengungkapan yang rinci mengenai upaya ini, maka perusahaan yang lebih besar akan memiliki peringkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih kecil. Patten (1991) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menerima lebih banyak perhatian dari masyarakat umum dan kondisi ini menyebabkan perusahaan berada dibawah tekanan publik yang lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya, salah satunya adalah dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cowen et al., (1987).

#### **4.4.5 Pengaruh Risiko Industri terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi di Perusahaan**

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa kompetensi risiko industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi di perusahaan karena nilai  $\text{sig}/2$  0,0265 (kurang dari alfa 0,05) dan beta negatif sebesar -0,450. Pengaruh negatif dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat risiko korupsi pada suatu industri akan berdampak pada pengungkapan anti korupsi yang rendah.

Risiko industri merupakan risiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan korupsi di lingkungan kegiatan bisnisnya. Berdasarkan identifikasi dari *Transparency International* yang dimuat dalam jurnal Healy dan Serafeim (2011) industri yang termasuk *high risk* adalah industri minyak dan gas, kehutanan, pertambangan, pertahanan, konstruksi, dan telekomunikasi. Perusahaan yang beroperasi di lingkungan dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi akan memiliki kecenderungan menutup diri karena telah mendapat tekanan atau stigma negatif dari masyarakat. Sehingga dengan kondisi ini perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang tinggi tingkat korupsinya memilih untuk tidak mengumbar atau mengungkapkan

komitmen anti korupsinya agar tidak menarik perhatian atau menjadi sorotan masyarakat mengenai kegiatan bisnis yang dianggap meragukan. Selain itu perusahaan yang berada di lingkungan yang tinggi tingkat korupsinya lebih berpotensi memiliki banyak konflik dan permasalahan di dalam perusahaannya. Menyikapi keadaan ini, pihak manajer lebih memilih untuk menutup diri atau tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi dalam rangka berusaha menutup-nutupi perilaku buruk atau permasalahan yang ada di perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di lingkungan industri yang tinggi risiko korupsinya akan memiliki kecenderungan untuk tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsinya.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan Healy dan Serafeim (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang tinggi tingkat korupsinya, dapat melakukan pengungkapan yang luas mengenai upaya anti korupsi untuk mengkomunikasikan komitmen mereka kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan juga untuk mengurangi risiko.

#### **4.4.6 Pengaruh Keberagaman *Gender* dalam anggota komisaris terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi (Variabel Kontrol)**

Variabel keberagaman *gender* memiliki nilai sig/2 sebesar 0,114 yakni lebih dari alfa 0,05 dan beta positif sebesar 0,508. Hal ini menandakan bahwa keberagaman *gender* dalam anggota komisaris

tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi di perusahaan. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Feijoo *et al* (2012) yang dikutip dalam de Melo (2015) serta Swamy *et al* (2000).

